
**ANALISIS PERBANDINGAN DAN ANALISIS SUMBER SERTA PENGGUNAAN
DANA PADA APBDESA SLEMANAN**

Dyah Purwitasari *)
Sri Witurachmi ¹⁾
Muhtar ²⁾

*Pendidikan Ekonomi-BKK Akuntansi, FKIP Universitas Sebelas Maret
Surakarta, 57126, Indonesia
Dytasari@yahoo.co.id

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kinerja keuangan Desa Slemanan dengan menggunakan analisis perbandingan dan analisis sumber serta penggunaan dana. Penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah Pemerintah Desa Slemanan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Analisis data dengan menggunakan teknik analisis perbandingan dan analisis sumber serta penggunaan dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Slemanan berdasarkan analisis perbandingan dan analisis sumber dan penggunaan dana menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik, dapat ditunjukkan baik pada kinerja pendapatan desa maupun kinerja belanja desa. Simpulan penelitian ini adalah analisis perbandingan dan analisis sumber serta penggunaan dana dapat digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan Desa (APBDesa) Slemanan.

Kata kunci : Analisis Perbandingan, Sumber dan Penggunaan Dana

Abstract: The purpose of this study was to determine the financial performance of the Slemanan village by using comparative analysis and analysis of the sources and uses of funds. This research is a qualitative descriptive study. Subject were Slemanan village government. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. The data validity is checked by using triangulation techniques of sources and methods. Data analysis was performed by using comparative analysis techniques and analysis of sources and uses of funds. Results of this study indicate that the village's financial performance in Slemanan based on comparative analysis and analysis of sources and uses of funds shows that financial performance is quite good, which can be shown either on the income and expenditure performance of the village. Conclusions of this study is a comparative analysis and analysis of sources and uses of funds can be used to determine the financial performance of village (APBDesa) in Slemanan.

Keywords: Comparative Analysis, Sources and Uses Of Funds

PENDAHULUAN

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya.

Menurut Mustofa (2012: 4) akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah atas keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan

publik yang harus direspon secara positif. Sejalan dengan pendapat Khafid (2009: 99-100) yang menyatakan bahwa upaya pemerintah daerah untuk menerapkan sistem akuntansi pemerintah daerah untuk mendukung terciptanya *good governance* tidaklah mudah. Hal itu dikarenakan masih terdapat kendala, yaitu: (1) Pemerintah Daerah yang sangat familiar dengan sistem anggaran tradisional (*line-item budgeting*), (2) sistem anggaran yang belum berdasarkan kinerja, (3) masih kurangnya kepedulian para manajer di lingkungan pemerintah daerah untuk mendasarkan keputusannya pada informasi keuangan, (4) masih terdapat banyak daerah yang tidak memiliki dana untuk memberikan pelayanan minimum bagi masyarakatnya.

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengawasi pemerintah desa melalui wakil-wakilnya di desa. Melalui pengawasan yang dilakukan wakil-wakilnya di Desa, Pemerintah Desa dianjurkan dan diharuskan menyusun serta mempublikasikan APBDesa sebagai bentuk akuntabilitas publik atas kinerjanya. Desa merupakan sebuah intitusi legal formal, oleh karena itu ada kewenangan penuh bagi desa dalam mengelola keuangannya, dan ada kewajiban desa menyusun APBDesa dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya, serta ketika banyak program/kegiatan yang langsung diarahkan ke desa baik oleh

Pemerintah Pusat dan Daerah maupun lembaga lain, maka Desa perlu atau harus menyusun APBDesa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari APBD. APBDesa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan.

Adapun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pendapatan Desa terdiri atas: Pendapatan Asli Desa, Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota, Bagian dari retribusi Kabupaten/Kota, Alokasi dana desa, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan desa lainnya, Hibah dan sumbangan pihak ketiga. Belanja desa terdiri atas: belanja langsung yang terdiri

dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal; belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, belanja hibah (pembatasan hibah), belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Untuk pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Oleh karena itu, mempelajari keuangan desa tidak dapat terlepas dari mempelajari keuangan secara umum meskipun sangat terbatas (Surianingrat, 1976: 23). Berdasarkan uraian atau penjelasan mengenai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, maka penulis tertarik untuk menganalisis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan sebagai objek penelitiannya digunakan APBDesa Slemanan tahun 2009, 2010, dan 2011. Desa Slemanan merupakan desa yang terletak di kecamatan Udanawu kabupaten Blitar propinsi Jawa Timur. APBDesa Slemanan dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan, misalnya dari tahun 2009-2011: pada tahun 2009 APBDesa sebesar Rp 194.757.000,00, kemudian pada tahun 2010 anggarannya naik menjadi Rp 245.964.000,00 namun

pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi Rp 239.763.000,00.

Masyarakat Desa Slemanan secara umum tidak mengetahui bagaimana realisasi APBDesa yang telah dijalankan oleh Aparatur Desa, sehingga dalam penyusunan APBDesa ini masih ditemukan kurang adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban Aparatur Desa Slemanan atas sebuah keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan dalam APBDesa tidak disajikan secara transparan. Selain itu kondisi seperti ini terjadi karena masyarakat desa setempat tidak tahu akan pentingnya akuntabilitas keuangan desa, sehingga para Aparatur Pemerintah Desa didalam mengalokasikan anggaran masih ditemukan adanya inefisiensi anggaran, sebab bagaimana dana itu digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjai tidak diungkapkan secara terbuka kepada publik.

Adanya suatu transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa akan dapat diketahui sejauh mana Pemerintah Desa Slemanan telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Transparansi pengelolaan keuangan desa Slemanan sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja keuangan desa

kepada masyarakat harus disajikan secara terbuka dan jujur dalam bentuk laporan akuntabilitas publik.

Pemerintah yang akuntabel merupakan pemerintah yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik. Pertanggungjawaban tersebut tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu didukung dengan laporan pertanggungjawaban tertulis berupa penyajian laporan keuangan atas kinerja yang telah dicapai. Oleh karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu untuk pembuatan keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan terhadap anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

Terdapat beberapa metode dan teknik dalam analisis laporan keuangan, teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan antara lain adalah analisis perbandingan dan analisis

sumber serta penggunaan dana. Munawir dan Riyanto (2001: 36) mendefinisikan “analisis perbandingan sebagai metode dan teknik analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, dengan menunjukkan data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah, kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah, kenaikan atau penurunan dalam prosentase, perbandingan yang dinyatakan dengan ratio, dan prosentase dari total. Analisa dengan menggunakan metode ini akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi, dan perubahan mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut”.

Dana sangat berperan dalam menentukan kelancaran kegiatan organisasi atau perusahaan, maka aliran dana harus direncanakan dan diawasi dengan baik, baik penerimaannya (sumber-sumbernya) maupun penggunaannya (pengeluarannya). Sumber dan penggunaan dana ada yang berifat rutin atau terus-menerus dan ada pula yang bersifat insidental atau tidak terus-menerus. Untuk memperdalam pemahaman mengenai sumber dan penggunaan dana, Jumingan (2006: 96) mengemukakan “laporan sumber dan penggunaan dana disusun untuk menunjukkan perubahan dana selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan dana tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber dana dan penggunaannya. Laporan sumber

dan penggunaan dana menggambarkan atau menunjukkan aliran atau gerakan dana, yaitu sumber-sumber penerimaan dan penggunaan dana dalam periode yang bersangkutan”.

Menurut Alwi (1994: 349) analisis sumber dan penggunaan dana adalah merupakan alat penting bagi *finansial manager*, untuk mengetahui aliran dana, dari mana aliran dana tersebut dan ke mana dana itu digunakan. Maksud utama dari analisa tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjai.

Hasil dari perhitungan analisis perbandingan dan sumber serta penggunaan dana perlu diinterpretasikan, sehingga dapat dievaluasi kinerja keuangan organisasi dan selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan tertentu. Penggunaan analisis perbandingan dan analisis sumber serta penggunaan dana pada sektor publik khususnya terhadap APBDesa masih sangat terbatas atau belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis perbandingan dan sumber serta penggunaan dana terhadap APBDesa perlu dilaksanakan meskipun kaidah akuntansi dalam APBDesa berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki

perusahaan, baik perusahaan publik ataupun swasta.

Berdasarkan pada pemaparan sebelumnya, maka penelitian ini mengambil judul “ANALISIS PERBANDINGAN DAN ANALISIS SUMBER SERTA PENGGUNAAN DANA PADA APBDESA SLEMANAN KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR TAHUN 2009-2011”.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat dirumuskan 1) “Bagaimana kinerja keuangan Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tahun 2009-2011 dengan menggunakan analisis perbandingan?”; 2) “Bagaimana kinerja keuangan Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tahun 2009-2011 dengan menggunakan analisis sumber dan penggunaan dana?”.

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah, dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui kinerja keuangan Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tahun 2009-2011 dengan menggunakan analisis perbandingan; 2) Untuk mengetahui kinerja keuangan Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tahun 2009-2011 dengan menggunakan analisis sumber dan penggunaan dana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Kepala Desa Slemanan. Jadwal pelaksanaan penelitian dilaksanakan dari bulan Januari sampai bulan Mei 2013.

Subyek penelitian adalah Pemerintah Desa Slemanan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa data mengenai gambaran umum desa, struktur dan uraian tugas masing-masing bagian dalam organisasi, strategi dan arah kebijakan pembangunan desa. Data kuantitatif berupa data APBDesa dan realisasi APBDesa Slemanan tahun anggaran 2009-2011. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa data hasil observasi dan wawancara dengan pemerintah desa dan lembaga desa serta masyarakat, sedangkan data sekunder berupa data keuangan desa.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis perbandingan dan analisis sumber dan penggunaan dana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data APBDesa Slemanan pada tahun anggaran 2009 sampai

dengan tahun anggaran 2011 dimana perbandingannya dilakukan dengan menggunakan data keuangan dari tahun anggaran sebelumnya sebagai tahun dasar (tahun pembanding) dapat diketahui bahwa telah terjadi perubahan angka atau dana yang telah dianggarkan. Perubahan itu terjadi baik pada anggaran pendapatan maupun anggaran pada pos belanja.

Pada tahun anggaran 2010 penerimaan PADesa mengalami kenaikan sebesar 47,85% dengan nominal sebesar Rp 31.207.000,00 tetapi pada tahun anggaran 2011 terjadi penurunan sebesar Rp 4.604.000,00 atau sebesar 4,77%. Namun hal tersebut diimbangi dengan adanya kenaikan penerimaan pada Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dalam tahun anggaran 2010 pada komponen Bantuan ADD sebesar 18,07% atau senilai Rp 20.000.000,00, meskipun pada tahun anggaran 2011 komponen ini mengalami penurunan Rp 1.597.000,00 atau 1,22% . Hal ini dapat ditafsirkan bahwa meskipun penerimaan PADesa tidak besar namun masih dalam batas kewajaran karena memang kemampuan desa dalam menghasilkan PADesa hanya sebesar yang dianggarkan.

Komponen pendapatan lainnya yang berasal dari bagi hasil PBB atau penyisihan dari Kabupaten dan Bantuan Dana TPAPD setiap tahunnya dianggarkan

sama sehingga selama kurun waktu antara tahun 2009-2011 alokasinya tetap. Kondisi tersebut dikarenakan untuk komponen bagi hasil PBB atau penyisihan dari Kabupaten jumlah penerimaan baku bagi hasil PBB tidak ada perubahan atau tetap kecuali bila ada penambahan objek pajak dari masyarakat, sedangkan dalam kurun waktu tersebut tidak ada penambahan objek pajak dari masyarakat. Pada komponen Bantuan Dana TPAPD memang tidak ada perubahan, namun apabila ada penyesuaian UMR Kabupaten dan juga terdapat perubahan anggaran keuangan kabupaten penerimaan pada komponen ini juga mengalami perubahan.

Berdasarkan data perbandingan APBDesa tersebut dapat diketahui bahwa perbandingan pos belanja langsung pada tahun anggaran 2010 atas 2009 mengalami kenaikan sebesar 12,19% dengan nominal sebesar Rp 13.007.090,00, akan tetapi data perbandingan pada tahun anggaran 2011 atas 2010 terjadi penurunan anggaran sebanyak 20,16% atau sebesar Rp 24.138.490,00. Keadaan tersebut terjadi karena dalam kurun waktu antara tahun anggaran 2009 sampai 2011 banyak pos-pos pada belanja langsung yang sifatnya insidental. Hal tersebut banyak terjadi pada komponen belanja barang/jasa, sebab pada pos belanja barang/jasa banyak komponen yang hanya dianggarkan pada satu tahun

anggaran saja dengan pertimbangan bahwa setelah tercapai target anggarannya atau telah terlaksana program kerjanya maka pada tahun anggaran berikutnya komponen tersebut sudah tidak dianggarkan lagi atau bukan menjadi hal yang krusial lagi.

Kondisi sebaliknya terjadi pada pos belanja tidak langsung dimana dalam kurun waktu tahun anggaran 2009-2011 anggarannya selalu mengalami kenaikan. Berdasarkan data perbandingan APBDesa Slemanan pada tahun anggaran 2010 atas 2009 terjadi kenaikan anggaran sebesar 43,39% dengan nilai nominal kenaikan Rp 38.199.910,00, sedangkan pada tahun anggaran 2011 atas 2010 kenaikan yang terjadi hanya sebesar 14,21% dengan nominal kenaikan sebesar Rp 17.937.490,00. Adanya kenaikan yang terus menerus pada pos belanja tidak langsung dikarenakan merupakan anggaran yang berkaitan dengan honorarium seluruh Aparatur Pemerintah Desa Slemanan atau anggaran yang langsung berkaitan dengan sumberdaya manusia. Pemerintah Desa Slemanan dalam hal ini memang mengalokasikan lebih dari setengah anggaran belanja tidak langsungnya untuk membayar belanja pegawai/penghasilan tetap. Anggaran yang berkaitan langsung dengan penghasilan seseorang dalam belanja tidak langsung ini dianggarkan lebih banyak dengan alasan hal ini juga akan berdampak

pada produktivitas kinerja Pemerintah Desa Slemanan, dengan pertimbangan bahwa apabila kesejahteraan dari Perangkat Desa Slemanan diperhatikan maka kinerja yang akan diberikan untuk desa Slemanan juga diharapkan bisa maksimal.

Kondisi sebaliknya terjadi pada pos belanja tidak langsung dimana dalam kurun waktu tahun anggaran 2009-2011 anggarannya selalu mengalami kenaikan. Berdasarkan data perbandingan APBDesa Slemanan pada tahun anggaran 2010 atas 2009 terjadi kenaikan anggaran sebesar 43,39% dengan nilai nominal kenaikan Rp 38.199.910,00, sedangkan pada tahun anggaran 2011 atas 2010 kenaikan yang terjadi hanya sebesar 14,21% dengan nominal kenaikan sebesar Rp 17.937.490,00. Adanya kenaikan yang terus menerus pada pos belanja tidak langsung dikarenakan merupakan anggaran yang berkaitan dengan honorarium seluruh Aparatur Pemerintah Desa Slemanan atau anggaran yang langsung berkaitan dengan sumberdaya manusia. Pemerintah Desa Slemanan dalam hal ini memang mengalokasikan lebih dari setengah anggaran belanja tidak langsungnya untuk membayar belanja pegawai/penghasilan tetap. Anggaran yang berkaitan langsung dengan penghasilan seseorang dalam belanja tidak langsung ini dianggarkan lebih banyak dengan alasan hal ini juga akan berdampak

pada produktivitas kinerja Pemerintah Desa Slemanan, dengan pertimbangan bahwa apabila kesejahteraan dari Perangkat Desa Slemanan diperhatikan maka kinerja yang akan diberikan untuk desa Slemanan juga diharapkan bisa maksimal.

Berdasarkan analisis sumber dan penggunaan dana dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Desa (PADesa) memberikan kontribusi terhadap total pendapatan sebesar 33,49% atau senilai Rp 65.225.000,00 dari total pendapatan pada APBDesa tahun anggaran 2009 sebesar Rp 194.757.000,00. Angka ini memiliki arti bahwa pada tahun anggaran 2009 komponen PADesa hanya memberikan kontribusi yang lebih kecil dibandingkan dengan komponen Dana Perimbangan Keuangan Pusat, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan Desa Slemanan terhadap adanya bantuan dari pemerintah cukup besar.

Pendapatan Asli Desa (PADesa) pada tahun anggaran 2010 memberikan kontribusi terhadap total pendapatan sebesar 39,21% atau senilai Rp 96.432.000,00 dari total pendapatan pada APBDesa tahun anggaran 2009 sebesar Rp 245.964.000,00. Kontribusi PADesa terhadap total pendapatan pada tahun anggaran 2010 mengalami kenaikan dari pada tahun anggaran 2009. Kontribusi sebesar 39,21% memiliki arti bahwa

komponen PADesa hanya memberikan kontribusi yang lebih kecil dibandingkan dengan komponen Dana Perimbangan Keuangan Pusat, karena sumbangan PADesa untuk total pendapatan desa kurang dari 50% sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan Desa Slemanan terhadap adanya bantuan dana dari pemerintah cukup besar.

Pendapatan Asli Desa (PADesa) pada tahun anggaran 2011 memberikan kontribusi terhadap total pendapatan sebesar 38,29% atau senilai Rp 91.828.000,00 dari total pendapatan yang telah dianggarkan sebesar Rp 239.763.000,00. Angka ini memiliki arti bahwa pada tahun anggaran 2011 komponen PADesa hanya memberikan kontribusi yang lebih kecil dibandingkan dengan komponen Dana Perimbangan Keuangan Pusat yaitu dana bantuan ADD, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan Desa Slemanan terhadap adanya penerimaan bantuan dana dari pemerintah cukup besar.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Kinerja keuangan Desa Slemanan pada tahun anggaran 2009-2011 berdasarkan analisis perbandingan menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik, hal tersebut dapat ditunjukkan baik pada kinerja pendapatan desa maupun kinerja belanja desa. Pada komponen pendapatan dimana

data perbandingan yang dijadikan sebagai tahun dasar (pembanding) adalah tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa kinerja pendapatan dinyatakan cukup baik yaitu ditunjukkan dengan terlampauinya target anggaran sebesar 111,61% atau Rp 274.514.000,00 pada tahun anggaran 2010 dan pada tahun anggaran 2011 sebesar 111,58% atau Rp 267.517.000,00. Begitu juga pada komponen belanja, kinerjanya juga dapat dinyatakan cukup baik meskipun realisasi belanja tahun anggaran 2010 dan 2011 adalah sebesar 100% dari jumlah yang dianggarkan (tidak melampaui target anggaran yang ditetapkan). Namun, berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa dalam penggunaan APBDesa Slemanan masih harus diupayakan atau dilakukan penghematan pada beberapa komponen belanja baik pada belanja langsung maupun tidak langsung agar menunjukkan kinerja anggaran yang optimal.

Kinerja keuangan Desa Slemanan pada tahun anggaran 2009-2011 berdasarkan analisis sumber dan penggunaan dana menunjukkan kinerja keuangan yang masih dapat dikategorikan cukup baik, namun belum dalam kondisi yang cukup stabil dalam memperoleh sumber dana. Hal tersebut terlihat bahwa kontribusi PADesa pada tahun anggaran 2009 terhadap total pendapatan desa hanya sebesar 33,49%,

dimana kontribusi terbesarnya berasal dari dana perimbangan keuangan pusat yaitu dari komponen Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD). Meskipun pada tahun anggaran 2010 kontribusi PADesa terhadap total pendapatan naik menjadi 39,21%, akan tetapi pada tahun anggaran 2011 kontribusinya turun sebesar 0,92% atau menjadi 38,29%. Kondisi pada keuangan Desa Slemanan tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan desa terhadap adanya bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah masih tinggi, karena dalam kurun waktu antara tahun 2009-2011 terlihat bahwa penerimaan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah sangat tinggi yaitu setiap tahunnya lebih dari 50% dari total pendapatan yang dimiliki Desa Slemanan. Kondisi yang sama tampak pada pengalokasian atau penggunaan dana APBDesa, dalam hal ini Desa Slemanan belum dapat memprioritaskan anggarannya untuk membayar belanja langsung maupun tidak langsungnya. Terlihat bahwa pada pos belanja langsung pada komponen belanja barang/jasa mendapatkan porsi anggaran yang lebih kecil pada total belanjanya, alokasi untuk belanja barang/jasa ini masih tergolong rendah sebab penggunaan anggaran dalam kurun waktu antara tahun 2009-2011 untuk membayar belanja barang/jasa guna penyediaan sarana dan prasarana masih kurang dari 50%. Artinya

bahwa pemerintah Desa Slemanan belum mengoptimalkan penggunaan anggarannya untuk membayar belanja desa yang berkaitan dengan aktivitas pelayanan publik.

SARAN

Berdasarkan hasil perhitungan analisis perbandingan pada APBDesa Slemanan pada tahun anggaran 2009-2011 menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Slemanan cukup baik, maka hendaknya Pemerintah Desa Slemanan dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangannya dengan cara mengoptimalkan apa yang menjadi PADesa Slemanan, seperti mengoptimalkan potensi pertanian yaitu dengan memanfaatkan adanya lahan yang tidak terpakai atau lahan tidur untuk sesuatu hal yang bisa diperoleh hasilnya berupa uang. Disisi lain, Pemerintah Desa Slemanan harus bisa secara cermat mengelola anggaran, berapapun anggaran yang diterima tidak harus digunakan secara keseluruhan, maka Pemerintah Desa Slemanan harus bisa melakukan penghematan (efisiensi) terhadap penggunaan anggaran.

Berdasarkan hasil perhitungan analisis sumber dan penggunaan dana pada APBDesa Slemanan pada tahun anggaran 2009-2011 menunjukkan bahwa kinerja keuangannya Desa Slemanan masih dapat dikategorikan cukup baik, maka untuk meningkatkan kinerja keuangannya

Pemerintah Desa Slemanan harus meningkatkan sumber dana yang dimiliki dan mengurangi atau menekan anggaran yang dirasakan belum terlalu mendesak atau *urgen*, serta memprioritaskan penggunaan dana untuk membayar belanja Desa yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa guna penyediaan sarana dan prasarana publik. Sebab pada pos belanja langsung dalam komponen belanja barang/jasa mendapatkan porsi anggaran yang lebih kecil pada total belanjanya yaitu masih kurang dari 50%.

Dalam penyusunan APBDesa Slemanan sebaiknya harus diikuti oleh pihak-pihak yang sesuai dengan ketentuan terlibat dalam penyusunannya, agar pelaksanaan APBDesa dapat benar-benar dilaksanakan secara transparan dan jujur sehingga seluruh masyarakat khususnya warga Desa Slemanan mengetahui bagaimana bentuk akuntabilitasnya kepada publik tanpa terkecuali yang mana pada akhirnya publik dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan Desa Slemanan. Selain itu pada anggaran belanja untuk komponen yang berkaitan dengan sumberdaya manusia yaitu tentang pendidikan masyarakat seperti halnya anggaran untuk program PAUD maupun TK, untuk setiap tahun anggarannya sebaiknya harus selalu mendapatkan porsi anggaran. Hal ini dikarenakan komponen

tersebut berkaitan dengan sumberdaya manusia sebagai generasi penerus bangsa, oleh karena itu mutu sumberdaya manusia sedini mungkin harus diperhatikan dengan cara dimulai dari lingkungan masyarakat desa yang memperhatikan pelaksanaannya dengan mendapatkan dana untuk setiap tahun anggarannya untuk mendukung membiayai pelaksanaan programnya maupun honorarium pelaksanaannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ilmiah ini dapat terselesaikan atas bantuan berbagai pihak yang telah berkenan memberikan bantuan, bimbingan, arahan dan dorongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: (1) Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta (2) ketua BKK Akuntansi FKIP Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta (3) pembimbing I dan II, atas segala pengarahan dan bimbingannya selama penyusunan artikel ilmiah ini (4) Tim Redaksi Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) yang telah melakukan penyempurnaan editing artikel ini (5) Kepala Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar yang telah memberikan ijin penelitian skripsi ini beserta seluruh perangkat desa, (6) semua

pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan artikel ilmiah ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2002. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Anies Iqbal Mustofa. (2012). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia*, 1 (1), 1-6. Diperoleh 15 Desember 2012, dari <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Bambang Riyanto. 2001. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. Edisi Empat*. Yogyakarta: BPF
- Bayu Surianingrat. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Muhammad Khafid. (2005, September). Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 1 (2), pp. 99-107. Diperoleh 12 Maret 2013, dari <http://journal.unnes.ac.id/index.php/jda>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah